

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implikasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap iklim investasi dan persaingan usaha adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel bisa meminimalisir persaingan usaha yang tidak sehat seperti perang harga atau menerapkan harga dibawah standar (*predatory pricing*) yang merupakan praktek yang dilarang sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel tidak menghambat iklim investasi bidang perhotelan di kota Yogyakarta. Kesimpulan ini didasarka pada dua hal.

Pertama, secara preventif tidak ada pasal dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang menyatakan mengenai larangan melakukan izin usaha perhotelan di kota Yogyakarta. Kesempatan berusaha untuk berinvestasi dibidang pembangunan hotel masih tetap terbuka karena Perwalkot ini hanya bersifat sementara. Indikator lain dalam aspek preventif adalah keterlibatan semua *stakeholders* dalam proses penerbitan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Proses penerbitan Perwalkot ini berjalan cukup panjang dengan melibatkan berbagai pihak. Bahkan, Perwalkot justru lahir atas saran serta masukan dari para investor hotel di kota Yogyakarta yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA).

Kedua, secara *represif in-hern* Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel belum bisa dikategorikan sebagai Perda yang menghambat iklim investasi. Kesimpulan ini merujuk pada proses perizinan pembangunan hotel di kota Yogyakarta yang cukup transparan dan bisa diakses secara online sehingga bisa meminimalisir proses perizinan yang korup.

B. Saran

Ada beberapa saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian ini: Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan. Adapun saran tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan komunikasi dan sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel atau sekarang menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pembangunan Hotel agar informasi atas peraturan ini benar-benar bisa sampai kepada *stakeholders* terkait, baik dari sisi aspek tujuan atau objek yang ada dalam Perwalkot.

2. Pemerintah kota Yogyakarta selaku pihak yang menerbitkan Perwalkot moratorium hotel selayaknya memberikan kepastian hukum untuk para investor di bidang perhotelan. Perwalkot yang berlaku sekarang lebih menggambarkan kebijakan jangka pendek yang belum dipersiapkan secara lebih jauh.
3. Pihak investor harus bisa memahami Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel bukan hanya sekedar produk hukum semata, akan tetapi kondisi tata ruang beserta lingkungan sekitar serta kualitas pelayanan pariwisata sebagai bahan pertimbangan lahirnya Perwalkot tersebut.